



**PENGADILAN NEGERI
PALANGKARAYA**

Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV 2024

Pengadilan Negeri Palangkaraya
Jl. Diponegoro No. 21
Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya
Kalimantan Tengah, 73111
<https://pn-palangkaraya.go.id>
surat@pn-palangkaraya.go.id
Telp. (0536) 3221870

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) DI PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi
Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah

Disahkan di Palangkaraya
Pada hari Kamis 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya,



RICKY FARDINAND, S.H., M.H.
NIP. 19720611 199903 1 002

Penanggung Jawab Survei,

MANSYAH, S.H.
NIP. 19701213 199403 1 004

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai Indeks Persepsi Korupsi di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Palangkaraya mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai persepsi korupsi dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Palangkaraya, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporannya ini, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Palangkaraya dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palangkaraya, 2 Januari 2025

Tim Survei

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	2
DAFTAR GRAFIK.....	3
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	4
1.3. Landasan Hukum.....	4
1.4. Rencana Kerja	5
BAB II	7
METODOLOGI	7
2.1. Metode Penelitian	7
2.2. Populasi Dan Sampel	7
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	7
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	8
2.5. Teknik Analisis Data	8
2.6. Tahapan pelaksanaan	9
BAB III	11
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI.....	11
3.1. Profil responden.....	11
3.2. Indeks persepsi anti korupsi per indikator	14
3.3. Indeks Persepsi anti korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	25
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan.....	26
BAB IV.....	27
PENUTUP	27
4.1. Kesimpulan	27
4.2. Rekomendasi.....	27
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas	9
Tabel. 2 Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi	10
Tabel. 3 Nilai Persepsi	10
Tabel 4. Tingkat pendidikan responden	11
Tabel 5. Jenis pekerjaan responden	12
Tabel 6. Domisili Responden	13
Tabel 7. Usia responden	14
Tabel 8. Indeks pada indikator manipulasi peraturan	15
Tabel 9. Indeks pada penyalahgunaan jabatan	16
Tabel 10. Indeks pada indikator menjual pengaruh	17
Tabel 11. Indeks pada indikator Transaksi biaya	18
Tabel 12. Indeks pada indikator tambahan biaya	19
Tabel 13. Indeks pada indikator hadiah	19
Tabel 14. Indeks pada indikator transparansi pembayaran	21
Tabel 15. Indeks pada indikator percaloan	22
Tabel 16. Indeks pada indikator perbuatan curang	23
Tabel 17. indeks pada indikator transaksi rahasia	24
Tabel 18. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Palangkaraya	25
Tabel 19. Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Palangkaraya	25

DAFTAR GRAFIK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden menggunakan **aplikasi si-SUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik)** yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Survei Persepsi Anti Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 30 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1. Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel. 2 Ruang lingkup Survei Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel. 3 Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil responden

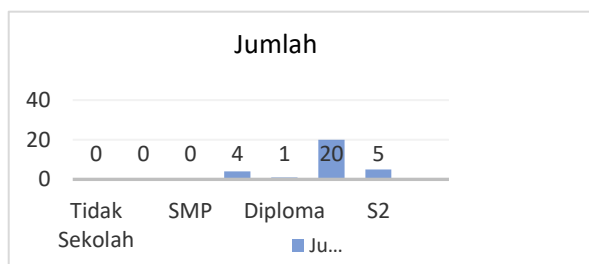
3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar tingkat Dasar, Menengah dan pendidikan tinggi.

Tabel 4. Tingkat pendidikan responden

No.	Jenis pendidikan	Frekuensi	
		jumlah	%
1.	Tidak sekolah	0	0,00
2.	SD	0	0,00
3.	SMP	0	0,00
4.	SMA	4	13.33
5.	DIPLOMA	1	3.33
6.	S1	20	66.67
7.	S2	5	16.67
Jumlah		30	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden

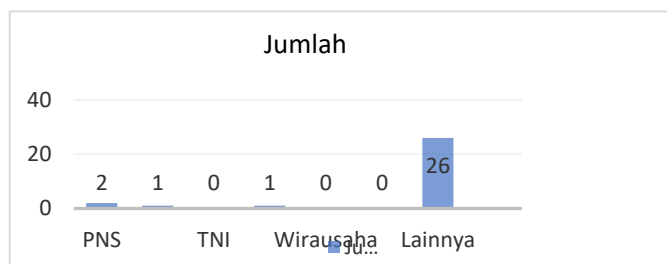
3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 86.67 % responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan sebagai masyarakat umum dan pengacara.

Tabel 5. Jenis pekerjaan responden

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		jumlah	%
1.	PNS	2	6.67
2.	Pegawai Swasta	1	3.33
3.	TNI	0	0,00
4.	POLRI	1	3.33
5.	Wirausaha	0	0,00
6.	Tenaga Kontrak	0	0..00
7.	Lainnya	26	86.67
Jumlah		30	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 2. Jenis Pekerjaan Responden

3.1.3. Domisili responden

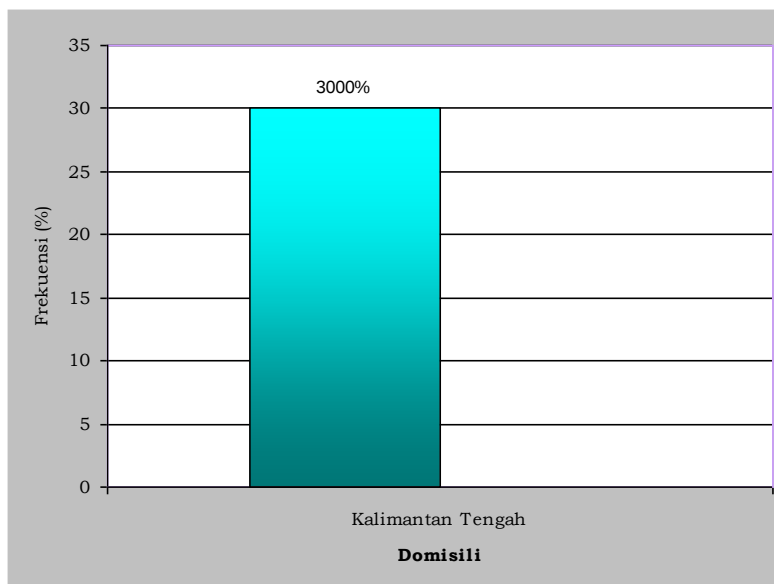
Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa

berdasar domilisi, responden semua berasal dari kota Kalimantan Tengah sebesar 100 %.

Tabel 6. Domisili Responden

No.	Domisili	Frekuensi	
		jumlah	%
1.	Kalimantan Tengah	30	100,00
Jumlah		30	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 3. Domisili Responden

3.1.4. Kelompok usia responden

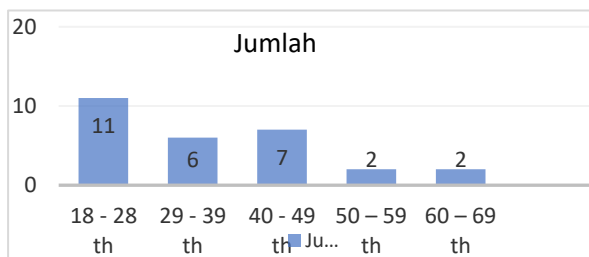
Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 17 tahun s/d 63 tahun. Bagi

kelompok usia di atas 63 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 18 tahun.

Tabel 7. Usia responden

No.	Rentang usia	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	18 - 28 Th	11	39.29
2.	29 - 39 Th	6	21.43
3.	40 - 49 Th	7	25.00
4.	50 - 59 Th	2	7.14
5.	60 - 69 Th	2	7.14
Jumlah		28	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 4. Rentang Usia Responden

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

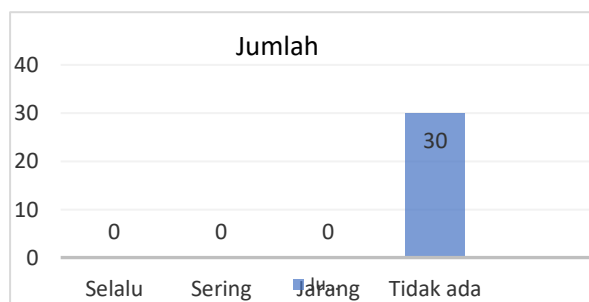
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri

Palangkaraya bersih dari korupsi.

Tabel 8. Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0,00
2.	Sering	2	0	0,00
3.	Jarang	3	0	0,00
4.	Tidak ada	4	30	100
Jumlah			30	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 5. Manipulasi Peraturan

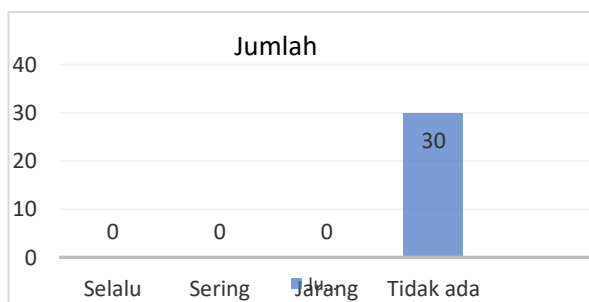
3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Palangkaraya bersih dari korupsi.

Tabel 9. Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0,00
2.	Sering	2	0	0,00
3.	Jarang	3	0	0,00
4.	Tidak ada	4	30	100
Jumlah			30	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 6. Penyalahgunaan Jabatan

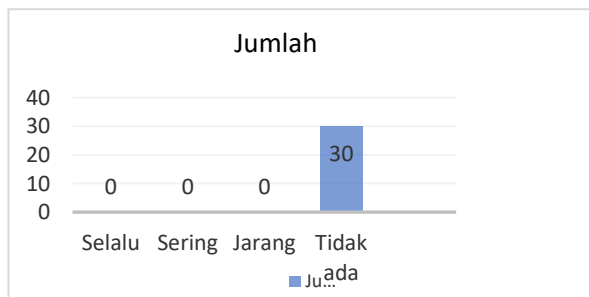
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Palangkaraya bersih dari Korupsi.

Tabel. 10. Indeks pada indikator menjual pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0,00
2.	Sering	2	0	0,00
3.	Jarang	3	0	0,00
4.	Tidak ada	4	30	100
Jumlah			30	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 7. Menjual Pengaruh

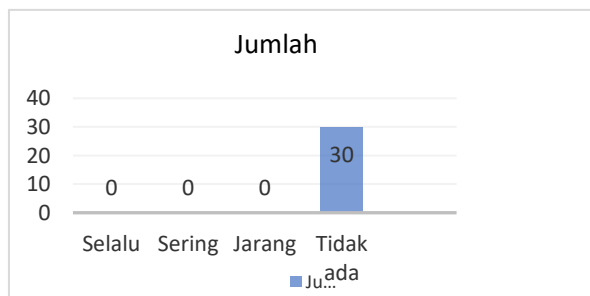
3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Palangkaraya bersih dari korupsi.

Tabel. 11. Indeks pada indikator Transaksi biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0,00
2.	Sering	2	0	0,00
3.	Jarang	3	0	0,00
4.	Tidak ada	4	30	100
Jumlah			30	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 8. Transaksi Biaya

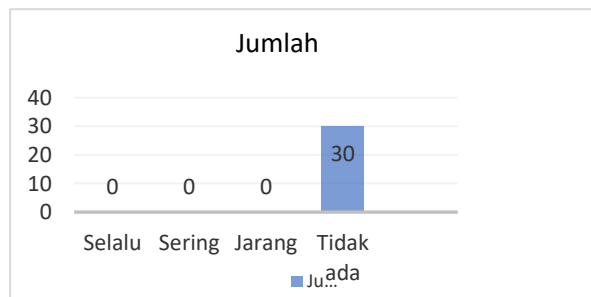
3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Palangkaraya bersih dari korupsi.

Tabel. 12. Indeks pada indikator tambahan biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0,00
2.	Sering	2	0	0,00
3.	Jarang	3	0	0,00
4.	Tidak ada	4	30	100
Jumlah			30	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 9. Tambahan Biaya

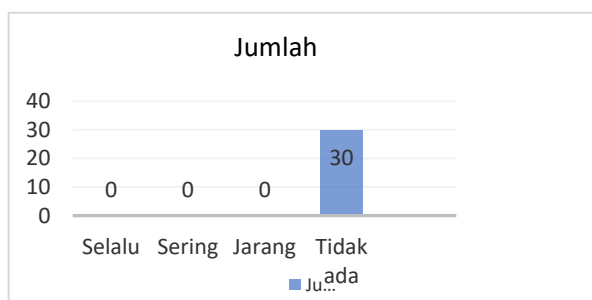
3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Palangkaraya bersih dari Korupsi.

Tabel. 13. Indeks pada indikator hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0,00
2.	Sering	2	0	0,00
3.	Jarang	3	0	0,00
4.	Tidak ada	4	30	100
Jumlah			30	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 10. Hadiah

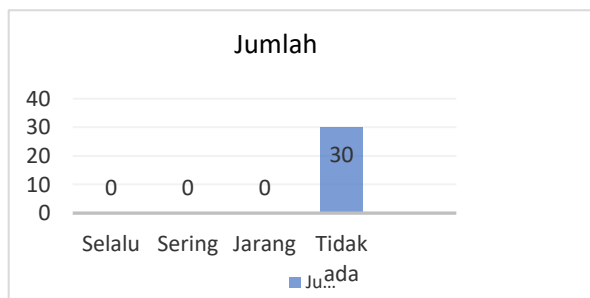
3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan transparan terhadap pembayaran.

Tabel. 14. Indeks pada indikator transparansi pembayaran

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak ada	4	30	100
Jumlah			30	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 11. Transparansi Pembayaran

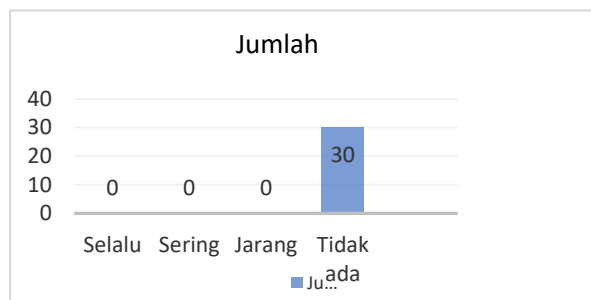
3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel. 15. Indeks pada indikator percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak ada	4	30	100
Jumlah			30	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 12. Percaloan

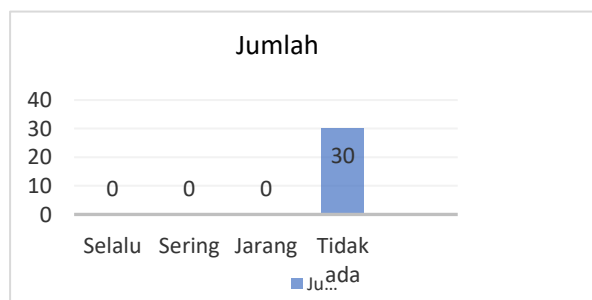
3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3,96. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari perbuatan curang.

Tabel .16. Indeks pada indikator perbuatan curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0,00
2.	Sering	2	0	0,00
3.	Jarang	3	0	0,00
4.	Tidak ada	4	30	100,00
Jumlah			30	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 13. Perbuatan Curang

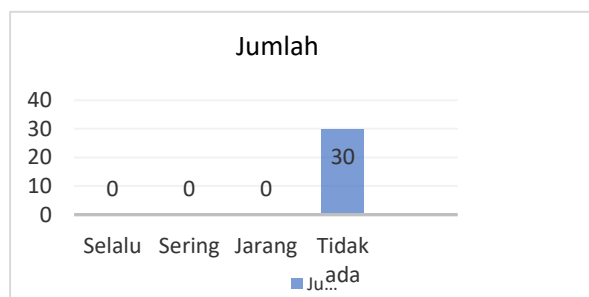
3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Palangkaraya hampir bersih dari Korupsi.

Tabel. 17. indeks pada indikator transaksi rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0,00
2.	Sering	2	0	0,00
3.	Jarang	3	0	0,00
4.	Tidak ada	4	30	100,00
Jumlah			30	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 14. Transaksi Rahasia

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Palangkaraya sebesar 4,00.

Tabel .18. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Palangkaraya

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata
Q 1	Manipulasi Data	4,00
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00
Q 3	Menjual Pengaruh	4,00
Q 4	Transaksi Biaya	4,00
Q 5	Biaya Tambahan	4,00
Q 6	Hadiah	4,00
Q 7	Tranparansi Biaya	4,00
Q 8	Percaloan	4,00
Q 9	Perbuatan Curang	4,00
Q 10	Transaksi Rahasia	4,00
Jumlah		4,00

Indeks 4,00 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81,26 – 100.

Tabel .19. Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Palangkaraya

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi

2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi Responden terhadap Kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Palangkaraya.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Palangkaraya diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Palangkaraya memiliki Indeks Persepsi Korupsi 4,00 atau masuk pada kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

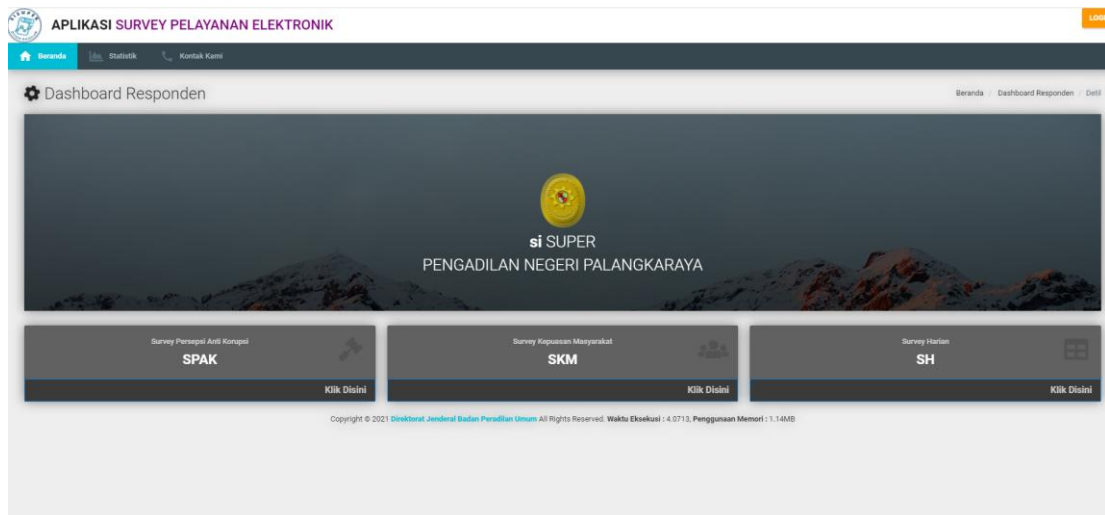
1. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,00.
2. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,00.
3. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,00.
4. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 4,00.
5. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,00.
6. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00.
7. Indikator Transaksi Rahasia mendapat Indeks 4,00.
8. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 4,00.
9. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,00.
10. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Negeri Palangkaraya Periode Oktober – Desember 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks 4,00. atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi.

Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Manipulasi Peraturan memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Data Responden SPAK

Nama	boleh inisial atau tidak diisi..	
Umur / Jenis Kelamin *	tahun	Pilih Jenis Kelamin
Minimal 18 Tahun		
Nomor HP *	+62	
Contoh : 81211112222		
Domisili *	Pilih Wilayah	
Pendidikan *	Pilih Pendidikan	
Pekerjaan *	Pilih Pekerjaan	

2 Layanan Layanan	3 Form Kuesioner isian form kuesioner SPAK	4 Kesan & pesan mohon isi kesan dan pesan Anda
-----------------------------	--	--

Layanan yang Anda dapatkan

Jenis Layanan *	Pilih Layanan Yang Didapat
	Pilih Layanan Yang Didapat Layanan Pidana Layanan Perdata Layanan Hukum / Informasi Layanan Administrasi Umum Layanan Niaga Layanan PHI Layanan Tipikor Layanan E-Court Layanan Inzage Layanan Perikanan
Pernah Menerima Layanan Ini Sebelumnya ? *	

PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondisi maupun pelayanan terhadap Bapak/ Ibu/saudara (i), dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara pengisian Kuesioner

Bapak/Ibu/Saudara(i) memberi tanda silang (X) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i).

KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan Survei						
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)		Selalu	Sering	Jarang	Tidak ada	Kode Pengolahan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Eksternal						
1.	Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan)	1	2	3	4	
2.	Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan)	1	2	3	4	
3.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara? (Menjual Pengaruh)	1	2	3	4	
4.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun	1	2	3	4	

	petugas layanan? (Transaksi Biaya)					
5.	Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? (Biaya Tambahan)	1	2	3	4	
6.	Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ? (Hadiah)	1	2	3	4	
7.	Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? (Transparasi Biaya)	1	2	3	4	
8.	Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan? (Percaloan)	1	2	3	4	
9.	Pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan? (Perbuatan Curang)	1	2	3	4	
10.	Pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan? (Transaksi Rahasia)	1	2	3	4	

UNSUR PERTANYAAN

RESPONDEN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30.	4	4	4	4	4	4	4	4	4

REKAPITULASI RESPONDEN

No	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/Pekerjaan
1	Ega Joana Putri R-099120-IPAK-78A01FC270 No. HP 82253766962	KALIMANTAN TENGAH	21 Tahun Perempuan	SMULAINNYA
2	MARTINI, S.H R-099120-IPAK-731033E2B7 No. HP 85252700222	KALIMANTAN TENGAH	46 Tahun Perempuan	S1LAINNYA
3	FRIDKING I. SH R-099120-IPAK-29B4BAB488 No. HP 81218424173	KALIMANTAN TENGAH	59 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA
4	YOSEF FREINADEMETZ S.D. R-099120-IPAK-C690998C90 No. HP 82143063116	KALIMANTAN TENGAH	38 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA
5	I WAYAN SURYAWAN R-099120-IPAK-CE424FC24F No. HP 87862240866	KALIMANTAN TENGAH	41 Tahun Laki-laki	S2PNS
6	Ruslian Fernando R-099120-IPAK-57F32DE905 No. HP 82351050143	KALIMANTAN TENGAH	28 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA
7	ADI, S.H R-099120-IPAK-6C1B1B7638 No. HP 81345365857	KALIMANTAN TENGAH	32 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA
8	YUFIN R-099120-IPAK-9880722C43 No. HP 81287720088	KALIMANTAN TENGAH	45 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA
9	A. Rofiq R-099120-IPAK-529F895C79 No. HP 81230466161	KALIMANTAN TENGAH	25 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA
10	Hendri R-099120-IPAK- DC147222DC No. HP 82351457297	KALIMANTAN TENGAH	29 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA
11	CHRISTINA EKA YULIANTI R-099120-IPAK-6E7DB8D827 No. HP 81804780404	KALIMANTAN TENGAH	24 Tahun Perempuan	Diploma 3LAINNYA
12	BUNGA R-099120-IPAK-F5957DBC3	KALIMANTAN TENGAH	25 Tahun Perempuan	S1SWASTA

	No. HP 85315515252			
13	RUSDI AGUS R-099120-IPAK-C56122AE3F No. HP 85249307985	KALIMANTAN TENGAH	45 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA
14	YULRA SARI R-099120-IPAK-7850C2539D No. HP 81295848133	KALIMANTAN TENGAH	22 Tahun Perempuan	S1LAINNYA
15	ARIFIN R-099120-IPAK-AD66EECEEFF No. HP 85647077760	KALIMANTAN TENGAH	40 Tahun Laki-laki	S1PNS
16	IPIK HARYANTO R-099120-IPAK-948E4DBC40 No. HP 85290508191	KALIMANTAN TENGAH	71 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA
17	Pua Hardinata, SH R-099120-IPAK-3844DE88AC No. HP 82255690738	KALIMANTAN TENGAH	66 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA
18	Rifqi Fadhil M. R-099120-IPAK-7AE4A8AC3B No. HP 8991472962	KALIMANTAN TENGAH	19 Tahun Laki-laki	SMULAINNYA
19	FEBRUASAE R-099120-IPAK-213D4AEC05 No. HP 81241901671	KALIMANTAN TENGAH	36 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA
20	Noto M. Saleh R-099120-IPAK-7138093452 No. HP 81258659867	KALIMANTAN TENGAH	65 Tahun Laki-laki	S2LAINNYA
21	Endas Trisniwati R-099120-IPAK-477837A247 No. HP 811514172	KALIMANTAN TENGAH	41 Tahun Laki-laki	S2LAINNYA
22	ADE PUTRAWIBAWA R-099120-IPAK-6D23F56C1C No. HP 82151042433	KALIMANTAN TENGAH	35 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA
23	FRIDKING I. SH R-099120-IPAK-3E4E6AAF46 No. HP 81218424173	KALIMANTAN TENGAH	59 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA
24	SANKRIS R-099120-IPAK-F9403DF3B4 No. HP 81349382539	KALIMANTAN TENGAH	29 Tahun Laki-laki	S1POLRI
25	MELATI SIMBOLON	KALIMANTAN	26 Tahun	SMULAINNYA

	R-099120-IPAK-440C46119C No. HP 82369851810	TENGAH	Perempuan	
26	Laili A. P R-099120-IPAK-3A2EED297D No. HP 85389795239	KALIMANTAN TENGAH	26 Tahun Perempuan	S1LAINNYA
27	DELIKA TAMARA R-099120-IPAK-3720D6EDB3 No. HP 85798208703	KALIMANTAN TENGAH	22 Tahun Perempuan	SMULAINNYA
28	ROMDLON IBNU R-099120-IPAK-F0E5C91C97 No. HP 81325746030	KALIMANTAN TENGAH	28 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA
29	RUSNAWATI R-099120-IPAK-61B8A06DA8 No. HP 81254750669	KALIMANTAN TENGAH	44 Tahun Laki-laki	S2LAINNYA
30	BARTHEL D. SUHIN R-099120-IPAK-910CFA661D No. HP 8125145859	KALIMANTAN TENGAH	70 Tahun Laki-laki	S2LAINNYA